



**STRATEGI PENINGKATAN KOMPONEN CADANGAN (KOMCAD)
KEMENTERIAN PERTAHANAN Mendukung SISTEM
PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA**

*Strategy for enhancing The Reserve Component (Komcad) Of The Ministry Of
Defense to support the national defense system*

David Frengky Maradona¹, Thomas Gabriel J², Sigit Purwanto³

^{1,2,3} Universitas Pertahanan Republik Indonesia

email penulis okbangetttt2025@gmail.com, ¹ jostgebi@gmail.com², email penulis
koresponden³

Abstract. *The Reserve Component (Komcad) is a strategic element of Indonesia's Total People's Defense and Security System (Sishankamrata), as mandated by Law No. 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. The establishment of Komcad aims to enhance the national defense posture in a collective and adaptive manner, particularly in responding to non-conventional and multidimensional threats. This study seeks to analyze the Ministry of Defense's strategic approach in formulating, managing, and evaluating the implementation of Komcad policies. Employing a qualitative method through literature review and policy document analysis, this research is grounded in strategic management theory and the total defense doctrine. The findings indicate that, despite having a clear legal and strategic foundation, the implementation of Komcad continues to face significant challenges, including institutional readiness, infrastructure limitations, and low levels of public participation. Therefore, strengthening Komcad in the future requires inter-institutional synergy, optimized resource utilization, and a continuous effort to raise public awareness and literacy on national defense.*

Keywords: *Reserve Component, Sishankamrata, Defense Strategy, Ministry of Defense, National Defense Awareness*

Abstrak. Komponen Cadangan (Komcad) merupakan elemen strategis dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pembentukan Komcad ditujukan untuk memperkuat postur pertahanan negara secara kolektif dan adaptif, terutama dalam merespons ancaman yang bersifat non-konvensional dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan strategis Kementerian Pertahanan dalam merumuskan, mengelola, dan mengevaluasi kebijakan pembentukan Komcad. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi

pustaka dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini bertumpu pada teori manajemen strategis dan doktrin pertahanan semesta. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah memiliki landasan hukum dan arah strategi yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesiapan kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan Komcad di masa mendatang memerlukan sinergi antarlembaga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan literasi bela negara secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Komponen Cadangan, Sishankamrata, Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Kesadaran Bela Negara.*

1. LATAR BELAKANG

Dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks dan sulit diprediksi telah mendorong perubahan signifikan dalam pendekatan pertahanan negara. Ancaman tidak lagi bersifat konvensional semata, melainkan hadir dalam bentuk yang lebih tersembunyi, multidimensional, dan sering kali melibatkan aktor non-negara. Fenomena seperti serangan siber, kampanye disinformasi, terorisme transnasional, bencana alam, pandemi global, hingga krisis perubahan iklim, menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dalam bentuk kekuatan militer tradisional. Dalam konteks tersebut, pertahanan negara perlu dirancang secara adaptif dan komprehensif, tidak hanya mengandalkan kekuatan utama militer, tetapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa secara terpadu.

Indonesia merespons realitas ini melalui pendekatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang merupakan doktrin strategis pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sistem ini menempatkan warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai bagian integral dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta, terarah, dan berkelanjutan. Esensi dari konsep ini adalah sinergi antara

kekuatan militer dan sipil untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman secara kolektif. Pendekatan ini mencerminkan model total defense yang berbasis partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi pertahanan jangka panjang.

Salah satu bentuk konkret dari implementasi Sishankamrata adalah pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) yang bertujuan memperkuat struktur pertahanan nasional. Komcad dirancang sebagai kekuatan pendukung terhadap Komponen Utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam merespons kebutuhan pertahanan yang bersifat eskalatif atau kontinjensi. Payung hukum atas pembentukan Komcad diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Melalui ketentuan ini, negara memiliki dasar legal untuk merekrut warga negara secara sukarela guna dibina dan dilatih dalam kerangka pertahanan negara. Keberadaan Komcad tidak hanya menjadi pelapis cadangan kekuatan tempur, tetapi juga bagian dari strategi fleksibel negara dalam memperluas kapasitas pertahanan.

Secara demografis, Indonesia menghadapi tantangan strategis berupa ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah personel militer aktif. Dalam hal ini, Komcad menjadi salah satu solusi untuk menjembatani keterbatasan tersebut. Kehadiran Komcad dinilai mampu menambah lapisan ketahanan yang bersifat terorganisir dan responsif, terutama ketika negara menghadapi ancaman berskala luas atau dalam waktu yang tidak terduga. Namun demikian, keberhasilan kebijakan pembentukan Komcad sangat bergantung pada kemampuan kelembagaan Kementerian Pertahanan dalam merancang strategi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial, kultural, serta dinamika geopolitik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis strategi yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dalam pembentukan

Komponen Cadangan. Tulisan ini bertujuan untuk menilai bagaimana kebijakan ini dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam kerangka sistem pertahanan nasional. Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian sebelumnya dengan memberikan perspektif strategis dan kelembagaan yang komprehensif, serta mengeksplorasi tantangan dan potensi penguatan kebijakan dalam rangka membangun daya tangkal nasional yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis global.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen strategis merupakan cara untuk berpikir dan bertindak yang membantu organisasi dalam merumuskan arah, tujuan, serta langkah-langkah untuk mencapainya. Menurut Wheelen dan Hunger (2008), ini adalah rangkaian keputusan yang melibatkan penilaian terhadap kondisi eksternal dan internal, perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta peninjauan kembali atas hasil-hasil yang dicapai. Heene dan Sebastian (2010) juga menegaskan bahwa manajemen strategis berperan dalam menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks pertahanan negara, pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana Kementerian Pertahanan merancang dan menjalankan program-programnya agar bisa menjawab kebutuhan pertahanan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Doktrin utama dalam sistem pertahanan Indonesia adalah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konsep ini menempatkan seluruh elemen bangsa sebagai bagian penting dalam menjaga pertahanan negara, yang meliputi TNI sebagai komponen utama, Komponen Cadangan (Komcad), serta Komponen Pendukung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menegaskan struktur ini sebagai upaya negara untuk melibatkan masyarakat dalam sistem pertahanan secara menyeluruh. Komcad hadir bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi untuk mengisi celah yang tidak bisa dipenuhi

oleh kekuatan militer aktif. Hal ini penting mengingat luasnya wilayah Indonesia dan berbagai potensi ancaman yang bersifat dinamis dan multidimensional, termasuk ancaman non-militer seperti serangan siber atau bencana alam.

Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pembentukan Komcad masih menghadapi berbagai kendala. Samsul Huda dan Agus Winarna (2025), misalnya, mencatat bahwa program ini belum efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya partisipasi publik. Pada J. Wijayanto (2024) lebih banyak menyoroti pentingnya integrasi antar komponen dalam menghadapi ancaman global, sementara. Penelitian lain dari Siti Kurniawati (2023) menekankan perlunya sinergi kelembagaan dalam konteks pertahanan non-militer, sedangkan Rina Handayani (2020) menyoroti minimnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama implementasi kebijakan Komcad. Meskipun sudut pandang berbeda-beda, semuanya menunjukkan bahwa isu Komcad masih menjadi perdebatan yang relevan dan memerlukan kajian lebih lanjut.

Tulisan ini mencoba mengambil posisi yang berbeda dengan menawarkan pendekatan strategis yang lebih terarah dan mendalam. Fokus utama adalah bagaimana Kementerian Pertahanan merancang strategi pembentukan Komcad, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, sampai pengawasan dan evaluasi. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen strategis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan Komcad dalam konteks pertahanan modern yang semakin kompleks. Tujuannya adalah agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Langkah-lagkah yang dilakukan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam strategi yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam pembentukan Komponen Cadangan (Komcad). Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan ini dijalankan dalam kerangka sistem pertahanan nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, peraturan pelaksanaannya, serta berbagai publikasi resmi dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, analisis terhadap hasil penelitian terdahulu juga dilakukan sebagai referensi pembandingan untuk melihat relevansi, tantangan, dan peluang strategi pembentukan Komcad. Penelusuran sumber sekunder diperkuat dengan pendekatan content analysis, yang memungkinkan peneliti untuk menarik makna dari teks melalui konteks strategis dan kebijakan yang dianalisis.

Dalam kerangka analisis, digunakan teori manajemen strategis sebagai pisau bedah untuk memahami siklus perencanaan hingga pengendalian kebijakan, serta konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai landasan normatif dalam pembentukan Komcad. Teori-teori ini menjadi kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas dan kelayakan strategi pertahanan non-konvensional yang dijalankan oleh negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa peluncuran resmi Komponen Cadangan (Komcad) dimulai pada tahun 2021 dengan jumlah awal 2.499 personel. Jumlah tersebut meningkat pada 2022 menjadi 2.974 personel. Kenaikan ini menjadi indikator adanya komitmen negara dalam membangun pertahanan yang lebih partisipatif. Namun demikian, pengembangan Komcad

tidak berjalan tanpa hambatan. Masalah struktural seperti belum terbentuknya organisasi Komcad yang mapan di berbagai tingkatan, alokasi anggaran yang terbatas, hingga stigma publik terhadap kemungkinan militerisasi sipil masih menjadi isu yang harus dihadapi. Selain itu, Komcad belum memiliki Grand Design nasional yang jelas, yang seharusnya menjadi fondasi arah pengembangan jangka panjang.

Analisis strategi Kemhan dalam mengelola Komcad dapat dirujuk pada pendekatan Arthur F. Lykke yang membagi strategi menjadi tiga unsur utama: cara (ways), sarana (means), dan tujuan (ends). Pada aspek 'cara', Kemhan telah menginisiasi berbagai langkah seperti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan dasar militer. Meski demikian, efektivitas sosialisasi masih terbatas, terutama dalam menjangkau wilayah yang belum tersentuh informasi memadai. Dari sisi 'sarana', dukungan infrastruktur, peralatan, serta logistik belum mampu sepenuhnya mendukung kebutuhan organisasi Komcad yang ideal. Sedangkan pada dimensi 'tujuan', Komcad diharapkan mampu memperkuat daya tangkal negara. Namun, realisasi di lapangan masih belum mencerminkan keseimbangan antara potensi jumlah cadangan dan kesiapan aktual menghadapi dinamika ancaman.

Dalam perspektif perbandingan, kekuatan cadangan Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok yang telah memiliki sistem cadangan terintegrasi dan jumlah personel dalam skala jutaan. Fakta ini menunjukkan bahwa pengembangan Komcad memerlukan lompatan kebijakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan tata kelola, dan penguatan peran lintas sektor yang berkelanjutan.

Keberadaan Komcad dalam sistem pertahanan nasional harus dilihat sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh, tidak terbatas pada domain militer. Komcad menjadi ruang partisipatif warga

negara yang menjembatani antara tanggung jawab sipil dan agenda strategis pertahanan negara. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan Komcad sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kementerian Pertahanan merancang dan mengeksekusi strategi secara inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Tantangan yang dihadapi tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga bersifat struktural dan sosial. Minimnya pemahaman masyarakat tentang nilai strategis Komcad masih menjadi hambatan tersendiri. Oleh sebab itu, strategi Kemhan perlu diperkuat dengan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya bela negara. Di sisi lain, peningkatan literasi bela negara melalui pendidikan formal maupun informal juga penting untuk menciptakan landasan sosial yang mendukung implementasi kebijakan Komcad.

Dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara (KUHAN) 2020–2024, pemerintah menekankan pentingnya pertahanan adaptif sebagai respons terhadap ancaman multidimensi. Dalam konteks ini, Komcad seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai kekuatan pendukung dalam konflik bersenjata, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam menghadapi ancaman nirmiliter seperti bencana alam, disrupsi siber, atau disinformasi publik. Oleh karena itu, pendekatan terhadap Komcad harus bersifat multidisipliner dan multilevel, yang mampu menjawab kebutuhan pertahanan kontemporer..

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Komponen Cadangan (Komcad) memiliki legitimasi hukum yang kuat serta peran strategis dalam mendukung Sistem Pertahanan Negara melalui konsep Sishankamrata. Komcad tidak hanya berfungsi sebagai cadangan militer, tetapi juga berperan dalam menjaga kohesi sosial, melaksanakan OMSP, serta menghadapi ancaman non-militer dan hibrida. Namun, implementasi Komcad masih menghadapi kendala

berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, disparitas kualitas personel antarwilayah, serta minimnya pembinaan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi penguatan Komcad perlu diarahkan pada tata kelola kebijakan yang terpadu, pembinaan berkesinambungan, modernisasi berbasis teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan Komcad yang profesional, terlatih, dan terintegrasi dengan TNI.

Sebagai saran untuk menjawab berbagai kesenjangan tersebut, Kementerian Pertahanan bersama TNI perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor, menyusun perencanaan anggaran berbasis multi-year planning, serta mengembangkan program pembinaan berkelanjutan pasca-pelatihan. Modernisasi sistem manajemen data digital yang terintegrasi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung mobilisasi dan evaluasi personel. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diperluas melalui sosialisasi nilai bela negara, pelibatan perempuan, serta tokoh masyarakat lokal agar Komcad lebih representatif. Integrasi dengan program bela negara dan OMSP harus ditingkatkan, sementara regulasi dan mekanisme evaluasi perlu diperbarui secara periodik agar adaptif terhadap dinamika ancaman multidimensional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afin, M. (2013). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Kencana.
- Heene, A., & Sebastian, S. (2010). *Strategic Management and Value Creation*. New York: Routledge.
- Samsul Huda & Agus Winarna. (2025). *Efektivitas Pembentukan Komcad dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Unhan Press.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). Strategi Pengelolaan Komponen Cadangan. Jakarta: Kemhan.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja Pembentukan Komcad Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Komcad Kemhan.

2. Jurnal

Subagyo, A. (2020). Relevansi sistem pertahanan semesta dalam menghadapi ancaman kontemporer. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 75–89.

Prabowo, S., & Syaefulloh, H. (2021). Kesadaran bela negara dalam perspektif strategi pertahanan non-militer. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 55–70.

Puslatpur, P., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. S. (2023). Kedudukan dan fungsi Komcad dalam UU No. 3 Tahun 2002. *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, 8(1), 102–118.

Handayani, R. (2020). Implementasi kebijakan Komcad dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2019. *Jurnal Administrasi Pertahanan*, 5(1), 90–105.

Kurniawati, S. (2023). Strategi Kementerian Pertahanan dalam penguatan pertahanan non-militer. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 9(2), 45–60.

Wijayanto, J. (2024). Komponen cadangan dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di abad 21. *Jurnal Geostrategi Indonesia*, 12(1), 77–92.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020–2024.